

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejadian Gempa bumi dan Tsunami tahun 2004 yang melanda Aceh menimbulkan kerusakan berbagai fasilitas, kehilangan harta benda dan banyaknya korban jiwa. Peristiwa tersebut juga dialami dan dirasakan Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh merupakan salah satu wilayah yang terkena bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2004 sehingga mengalami kerusakan fasilitas dan timbulnya korban jiwa. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2005:1) korban jiwa akibat bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Banda Aceh sebesar 77.804 jiwa meninggal dunia.

Besarnya dampak yang ditimbulkan seperti korban jiwa, kerusakan infrastruktur dan kerugian-kerugian lain yang diakibatkan oleh gempa bumi dan tsunami yang melanda Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana belum optimal. Tingginya jumlah korban jiwa ini juga dipicu oleh faktor keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bencana serta mitigasi bencana di sekeliling mereka, yang berakibat tidak adanya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Sebagaimana pernyataan Daud (2014:27) bahwa “salah satu faktor utama penyebab timbulnya banyak korban akibat bencana seperti gempa bumi adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bencana dan kesiapan mereka dalam mengantisipasi bencana tersebut”.

Mengingat Kota Banda Aceh termasuk wilayah yang dilalui oleh patahan aktif sesar Sumatera (Sesar Semangko) yang memanjang hingga Lampung dan sebagian besar wilayah Kota Banda Aceh berada di pesisir pantai, maka sewaktu-waktu bencana gempa bumi dan tsunami dapat mengancam. Sebagaimana Edward (2013:1) “Patahan Sumatera membentang sepanjang 1.900 km (dari Banda Aceh hingga Teluk Semangko di Selatan Lampung), membentang paralel dengan zona subduksi sebagai pengaruh dari konvergensi Lempeng Eurasia dengan Lempeng Indo-Australia”. Proses pergerakan lempeng tektonik secara terus menerus dapat

menyebabkan Aceh dan khususnya Kota Banda Aceh sangat berpotensi terhadap bencana Geologis seperti Gempa bumi dan Tsunami.

Melihat kondisi fisik tersebut, perlu adanya upaya membangun ketangguhan bencana bagi masyarakat yang berada pada wilayah rawan bencana. Membangun ketangguhan bencana diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni. Seseorang yang dilatih dan dibina untuk memiliki sikap kesiapsiagaan akan mampu untuk menghadapi bencana. Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian terpenting sebagai langkah awal dari upaya pengurangan risiko bencana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan adalah melalui pembelajaran.

Pembelajaran bukan hanya sebatas menyampaikan materi saja, melainkan proses pembelajaran dapat dilakukan dengan pengembangan sikap dan prilaku serta memperhatikan kondisi seluruh komunitas sekolah, sarana, prasarana dan prosedural yang saling mempengaruhi untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Pengetahuan yang dimiliki oleh individu melalui pembelajaran menjadi faktor penting dan langkah awal untuk pengembangan sikap dan prilaku yang berdampak pada peningkatan kesiapsiagaan bencana. Hal ini senada dengan pernyataan Firmansyah, Rasni, dan Rodhianto (2014:3) bahwa “Hubungan pengetahuan dengan perilaku kesiapsiagaan terhadap bencana banjir dan longsor menunjukkan hubungan yang kuat dan berpola positif, artinya semakin bertambah pengetahuan semakin tinggi perilaku kesiapsiagaannya”. Selain itu, hasil dari pembelajaran nantinya diharapkan dapat mengembangkan kompetensi yang ada pada diri individu dalam berperilaku.

Pengembangan kompetensi perilaku tersebut didasari oleh teori kognitif sosial Bandura. Menurut Bandura dalam Schunk (2012:222) “manusia dipandang sebagai serangkaian interaksi-interaksi timbal balik di antara faktor-faktor personal, perilaku-perilaku, dan peristiwa lingkungan”. Berdasarkan teori kognitif sosial tersebut, manusia dan lingkungan memiliki hubungan saling timbal balik dalam berinteraksi. Hubungan yang terjadi antara manusia dan lingkungan akan menumbuhkan perubahan prilaku ataupun perubahan sikap pada manusia. Ketika manusia berinteraksi dengan lingkungannya, maka manusia tersebut secara tidak langsung akan memiliki persepsi terhadap lingkungannya. Persepsi ini dapat

bersifat positif maupun bersifat negatif sehingga mempengaruhi perubahan sikap dan tingkah laku.

Persepsi individu terhadap lingkungan berawal dari stimulus yang diperoleh pada saat interaksi dilakukan. Hal inilah yang menjadikan individu mendapatkan informasi. Selain itu, interaksi yang terjadi antara individu dan lingkungan juga dapat menimbulkan suatu pengalaman tersendiri bagi dirinya sehingga dapat digunakan sebagai pembelajaran. Informasi yang diperoleh melalui pembelajaran di lingkungan sosial dapat merepresentasikan secara kognitif sebagai panduan untuk melakukan tindakan yang berdaya guna dalam mengantisipasi bencana. Salah satu lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap kesiapsiagaan individu adalah lingkungan sekolah.

Sekolah menjadi salah satu lembaga yang memiliki posisi strategis dan memegang peran penting dalam upaya pencegahan awal terhadap bencana dan mitigasinya. Hal ini dikarenakan sekolah dapat memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada seluruh komunitas sekolah dan masyarakat secara efektif. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh individu melalui sekolah dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perilaku dalam menghadapi bencana. Peningkatan tersebut tidak hanya dirasakan komunitas sekolah saja melainkan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Melihat pentingnya sekolah dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan bencana juga diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa, “Penanggulangan bencana harus terintegrasi ke dalam program pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan”.

Undang-Undang tersebut juga mempertegas bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor penentu dalam kegiatan pengurangan risiko bencana. Selanjtnya Astuti dan Sudaryono (2010:33) menyatakan bahwa “Sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat berfungsi sebagai media informasi yang efektif dalam mengubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat dengan memberikan pendidikan mitigasi di sekolah”. Hal ini didukung oleh Pribadi dan Yuliawati (2009:1) mengenai pendidikan siaga bencana gempa bumi sebagai upaya meningkatkan keselamatan siswa, yang menyatakan “terdapat peningkatan pengetahuan baik

untuk siswa maupun orang tua siswa setelah diberikan materi pendidikan siaga bencana”. Selain itu penelitian Soffer (2009:8) menyatakan bahwa:

*The importance of an educational intervention for enhancing knowledge about the threat of earthquakes in general and the practical knowledge concerning the recommended self-protective behaviour during and immediately after a large scale earthquake.*

Pentingnya pemberian pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah juga dinyatakan Ronan and Johnston dalam King and Tarrant (2013:18) bahwa:

*Important that all children have the opportunity to learn about natural disasters and to understand protective strategies. If a child learns about the nature of particular natural disasters and knows appropriate safety strategies to apply before, during, and after the event, this knowledge could enable not only the child and his or her family to survive, but also his or her community to survive the event and its aftermath.*

Berdasarkan pernyataan di atas, peningkatan kesiapsiagaan melalui pendidikan kebencanaan yang dilaksanakan disekolah dapat membentuk kesiapan dalam menghadapi bencana secara efektif, dinamis, dan berkesinambungan dalam upaya penyebarluasan pengetahuan tentang kebencanaan. Upaya yang dilakukan secara sistematis, terukur, dan implementatif dalam meningkatkan kesiapsiagaan bagi komunitas sekolah, diharapkan mampu mengurangi dampak risiko bencana baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Kesiapsiagaan yang terbentuk tidak hanya bermanfaat bagi warga sekolah saja, melainkan dapat bermanfaat bagi orang di lingkungan sekitarnya dalam menghadapi bencana yang dapat terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, dengan menyadari pentingnya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi ancaman bencana sedini mungkin melalui sektor pendidikan, maka pemerintah Aceh pada tahun 2009 melakukan peningkatan kesiapsiagaan pada komunitas sekolah.

Peningkatan kesiapsiagaan pada komunitas sekolah dilakukan dengan membangun sekolah model pada 3 (tiga) jenjang pendidikan, yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi Sekolah Siaga Bencana (SSB). Dibentuknya SSB bertujuan untuk menciptakan budaya kesiapsiagaan dan keselamatan di lingkungan sekolah. Budaya kesiapsiagaan yang terbangun diharapkan tidak hanya terjadi pada peserta

didik saja, melainkan meliputi seluruh komunitas sekolah seperti guru, kepala sekolah, orang tua, tenaga kependidikan, komite sekolah dan lainnya. Selain itu, dibentuknya SSB diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada setiap komunitas sekolah agar mampu memahami tentang gejala bencana dan bagaimana cara menanggulangnya.

Keberadaan SSB di Kota Banda Aceh ternyata memberikan pengaruh yang cukup positif terhadap peningkatan pengetahuan tentang bencana dan cara penanggulangannya sehingga menjadi siap dalam menghadapi ancaman bencana. Hal ini sesuai dengan temuan Riza (2015) bahwa siswa sekolah dasar SSB lebih siap dalam menanggulangi bencana dibandingkan dengan siswa Non SSB. Hal ini terlihat dari tindakan dan sikap siswa SSB lebih baik dibandingkan sikap dan tindakan siswa pada Non SSB. Selanjutnya temuan Oktari (2015) bahwa tingkat kesiapsiagaan komunitas di sekolah SSB lebih tinggi dibandingkan sekolah non SSB. Selain itu, berdasarkan observasi awal diketahui bahwa dengan adanya program SSB seluruh komunitas sekolah mengetahui jalur tercepat menuju tempat penyelamatan dan dimana lokasi tempat berkumpul bila terjadi bencana saat jam sekolah, sehingga tidak terjadi kepanikan di sekolah.

Melihat kontribusi positif yang diberikan SSB dalam meningkatkan kesiapsiagaan di lingkungan sekolah, tentulah keberadaan SSB di wilayah rawan bencana sangat efektif dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui sektor pendidikan. Namun upaya pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan pada komunitas sekolah belum dilakukan secara menyeluruh, terutama pada tingkat SMA. Berdasarkan data dari TDMRC-Unsyiah (2016), dari tahun 2009 sampai dengan sekarang, sekolah yang mendapat pendampingan menjadi SSB di Kota Banda Aceh, pada tingkat SMA Negeri hanya dua (2) sekolah yaitu SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 6.

Berdasarkan hal tersebut, tentulah upaya mewujudkan budaya kesiapsiagaan di lingkungan sekolah belum dilakukan secara menyeluruh pada komunitas sekolah yang berada di wilayah rawan bencana, terutama rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Kondisi sedemikian rupa, diduga tentu saja terdapat perbedaan tingkat kesiapsiagaan antara komunitas SSB dan Non SSB dalam menghadapi ancaman bencana. Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan Zaiyana (2014:816) adapun wilayah Kota Banda Aceh yang memiliki tingkat resiko bencana tsunami tinggi adalah kecamatan Meuraxa, Kutaraja, Kuta Alam dan Syiah Kuala. Dari empat wilayah tersebut, kedua SSB berada di Kecamatan Meuraxa, sedangkan tiga kecamatan lainnya belum memiliki SSB untuk tingkat SMA. Berdasarkan kondisi tersebut menunjukkan perlu adanya pengkajian mengenai tingkat kesiapsiagaan unsur komunitas SSB dan Non SSB dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami, serta faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan unsur komunitas sekolah dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami di Kota Banda Aceh.

Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapsiagaan komunitas sekolah yang berada di wilayah rawan bencana, baik SSB maupun Non SSB dikarenakan bila merujuk pada pengalaman bencana gempa bumi dan tsunami 2004 sekolah-sekolah yang berada di wilayah rawan bencana mengalami kerusakan bangunan dan banyak kehilangan warga sekolahnya. Oleh sebab itu perlu adanya pengkajian kembali bagaimana tingakat kesiapsiagaan unsur komunitas sekolah baik SSB maupun Non SSB dalam mengahadapi ancaman gempa bumi dan tsunami di Kota Banda Aceh untuk mengurangi jumlah korban jiwa bila terjadi bencana serupa di kemudian hari.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesiapsiagaan unsur komunitas SSB dan unsur komunitas Non SSB dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana perbedaan kesiapsiagaan unsur komunitas SSB dan unsur komunitas Non SSB dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami di Kota Banda Aceh?
3. Faktor apakah yang mempengaruhi kesiapsiagaan unsur komunitas SSB dan unsur komunitas Non SSB dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami di Kota Banda Aceh?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi tingkat kesiapsiagaan unsur komunitas SSB dan unsur komunitas Non SSB dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami di Kota Banda Aceh.
2. Mengidentifikasi perbedaan kesiapsiagaan unsur komunitas SSB dan unsur komunitas Non SSB dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami di Kota Banda Aceh.
3. Menganalisis faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan unsur komunitas SSB dan unsur komunitas Non SSB dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami di Kota Banda Aceh.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam menyempurnakan atau memantapkan *framework* kesiapsiagaan komunitas sekolah dan evaluasi pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana di Indonesia dan khususnya Kota Banda Aceh.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

##### a. Bagi Sekolah

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran bahwa untuk meningkatkan kesiapsiagaan komunitas sekolah membutuhkan dukungan dari seluruh unsur komunitas sekolah dan kebijakan dari sekolah dalam mendukung program pengurangan risiko bencana serta sebagai bahan masukan kepada pihak sekolah untuk melakukan upaya-upaya yang dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi.

b. Bagi Guru Geografi

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan guru geografi dapat meningkatkan kontribusinya terhadap peningkatan kesiapsiagaan komunitas sekolah.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahanpahaman penafsiran dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan konsep dalam definisi operasional sebagai berikut:

### **1. Kesiapsiagaan**

Kesiapsiagaan merupakan tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana dengan memfokuskan pada upaya pengembangan rencana untuk menanggapi bencana secara cepat dan efektif. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa “Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna”. Dalam penelitian ini, yang menjadi masalah adalah tingkat kesiapsiagaan komunitas sekolah dalam menghadapi ancaman Gempa Bumi dan tsunami.

### **2. Pengalaman Bencana**

Pengalaman bencana merupakan sesuatu yang telah dirasakan, dialami dan dilakukan pada masa lalu. Menurut Herdwiyantri dan Sudaryono (2013:5) “pengalaman personal secara langsung juga dapat mempegaruhi perilaku kesiapan”. Dalam penelitian ini, pengalaman bencana gempa bumi dan tsunami merupakan variabel bebas yang menjadi faktor pendukung kesiapsiagaan komunitas sekolah.

### **3. Persepsi Bencana**

Persepsi merupakan suatu proses pentransferan informasi ke dalam pikiran manusia. Menurut Siagian (1998:100) persepsi adalah “Persepsi dapat dipahami dengan melihatnya sebagai suatu proses melalui makna seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan-kesan sensorinya dalam usahanya memberikan makna tertentu pada lingkungannya”. Dalam penelitian ini,

persepsi bencana menjadi variabel bebas yang menjadi faktor pendukung kesiapsiagaan komunitas sekolah.

#### **4. Peran Guru**

Guru merupakan panutan dalam ruang lingkup sekolah yang memiliki tugas untuk memberikan informasi pada lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Menurut Mulyasa (2008:37)“Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan indikasi bagi peserta didik dan lingkungannya”. Dalam penelitian in, peran guru geografi menjadi variabel bebas yang menjadi faktor pendukung kesiapsiagaan komunitas sekolah.

#### **5. Komunitas Sekolah**

Komunitas sekolah merupakan salah satu *stakeholder* utama dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam sektor pendidikan. Dalam penelitian ini, komunitas sekolah yang akan diteliti merupakan komunitas sekolah siaga bencana dan sekolah non siaga bencana yang terdiri dari guru, peserta didik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kota Banda Aceh.

#### **6. Sekolah Siaga Bencana (SSB)**

Sekolah siaga bencana merupakan sekolah yang telah mendapat lisensi sebagai sekolah yang siap dalam menghadapi bencana. Menurut Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia (2011:10) kemampuan tersebut diukur dengan dimilikinya perencanaan penanggulangan bencana (sebelum, saat, dan sesudah bencana). Dalam penelitian ini yang di maksud sekolah siaga bencana adalah sekolah yang memiliki kemampuan untuk mengelola risiko bencana di lingkungannya dan telah mendapatkan label menjadi sekolah siaga bencana.